

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu Ibukota di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta juga disebut sebagai pusat dari ekonomi dan bisnis, serta pusat dari pemerintahan. Pada saat penjajahan Portugis, nama dari Kota Jakarta ini merupakan Sunda Kelapa. Lalu, berganti lagi menjadi Jayakarta ketika Portugis kalah dengan Pangeran Fatahillah, nama DKI Jakarta terus berganti ketika bangsa asing menduduki daerah tersebut. Seperti ketika Belanda datang berganti nama menjadi Batavia setelah mengambil ahli kekuasaan atas Jayakarta. Setelah itu, Jepang menduduki Batavia dan mengganti nama menjadi Jakarta Tokubetsu Shi. Setelah Merdeka nama Jakarta dipertahankan (jakarta.go.id). Tahun 1958, Jakarta sudah dinyatakan sebagai daerah otonom dengan nama Kotamadya Djakarta Raya dan masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Tahun selanjutnya, Tahun 1959 Jakarta telah berubah tingkat statusnya menjadi Daerah Tingkat Satu atau yang disebut Provinsi yang dijalankan oleh Gubernur. Tahun 1961, statusnya kembali berubah dari Provinsi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Berselang 3 tahun, di Tahun 1964 Jakarta resmi menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia (jakarta.go.id).

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta tergolong dataran rendah karena ketinggiannya hanya berkisar 7 meter dari permukaan laut. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas

sekitar 660,982 km² dan telah disebutkan dalam SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, pada tanggal 9 November 2022. DKI Jakarta memiliki pulau yang berada di Kepulauan Seribu, jumlah pulaunya sebanyak 113 pulau dan 1 pulau yang berada di Jakarta Utara. Selain itu, terdapat 17 buah saluran air yang berfungsi sebagai sumber air minum, penunjang kegiatan perikanan juga kebutuhan perkotaan. Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta berada di koordinat 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Posisi geografis Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Sedangkan, bagian selatan dan timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

DKI Jakarta sendiri memiliki struktur pemerintahan yang terbagi menjadi beberapa wilayah administratif. DKI Jakarta terdiri atas 5 kota administrasi dan satu kabupaten yang disebut Kabupaten Kepulauan Seribu. Dari enam wilayah tersebut mempunyai luas yang berbeda, wilayah yang terluas berada di Jakarta Timur sebanyak 28%. Sebanyak 22% luas dari Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Jakarta Barat memiliki luas 19% dan Jakarta Pusat memiliki luas sekitar 7%. Selain itu, luas dari Kepulauan Seribu sekitar 2% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Gambar 2.1 Peta DKI Jakarta



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2025)

2.1.2 Kondisi Demografi Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Disdukcapil DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 11.010.514 pada semester 1 tahun 2025. Dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki-laki tercatat berjumlah 5.521.290 jiwa dan penduduk perempuan tercatat berjumlah 5.489.224 jiwa. Dengan kelompok usia terdiri dari usia anak yang mencapai 2.940.197 jiwa, sebanyak 2.415.737 usia muda, usia produktif sebanyak 7.888.575, dan usia lansia berjumlah 1.167.038. Sedangkan, laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 0,23 persen dari tahun 2020 (BPS DKI Jakarta, 2025). Selain itu, terdapat jumlah penduduk WNA di DKI Jakarta yang berjumlah 8.483 jiwa dengan rincian 5.346 laki-laki dan 3.137 perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2023-2025

No	Kabupaten/Kota Administrasi	Jumlah Penduduk DKI Jakarta		
		2023	2024	2025
1.	Kepulauan Seribu	28.523	30.334	30.497
2.	Jakarta Selatan	2.235.606	2.331.411	2.323.644
3.	Jakarta Timur	3.079.618	3.230.417	3.224.519
4.	Jakarta Pusat	1.049.314	1.057.270	1.049.860
5.	Jakarta Barat	2.470.054	2.556.752	2.553.188
6.	Jakarta Utara	1.808.985	1.832.032	1.828.806
TOTAL		10.672.100	11.038.216	11.010.514

Sumber: DISDUKCAPIL dan BPS DKI Jakarta (2024-2025)

Tabel di atas adalah sebaran jumlah penduduk per Kabupaten/Kota di DKI Jakarta mengalami peningkatan di dua tahun terakhir (2023-2024) sebanyak 366.116 jiwa dan pada tahun 2025 mengalami penurunan jumlah penduduk sebanyak 27.702 jiwa. Kabupaten Kepulauan Seribu yang memiliki jumlah penduduk paling rendah sejumlah 30.497 jiwa (2025). Kota Jakarta Timur yang menempati jumlah paling tinggi sebanyak 3.224.519 jiwa (2025) dan Kota Jakarta Barat menduduki jumlah penduduk paling tinggi kedua setelah Kota Jakarta Timur, sebanyak 2.553.188 jiwa (2025). Penurunan jumlah penduduk yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2024 diduga oleh program penataan Administrasi Kependudukan, sehingga menyebabkan angka migrasi mengalami penurunan sebesar 37,47%.

Program Penataan Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil DKI Jakarta dibentuk untuk mengantisipasi adanya lonjakan peningkatan jumlah pendatang baru di DKI Jakarta pada periode arus balik lebaran 2025. Program tersebut dilakukan

untuk dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta. Tercatat pertumbuhan penduduk DKI Jakarta setiap bulannya sebesar 8.796 jiwa yang berasal dari kelahiran. Selain itu, di periode 2021-2024 adanya peningkatan penduduk setelah masa Lebaran dengan jumlah pendatang di Jakarta tercatat memiliki rata-rata sebanyak 22.412 jiwa. Disdukcapil DKI Jakarta melaksanakan program tersebut bertujuan untuk menertibkan kepemilikan NIK, agar memastikan bahwa NIK tersebut hanya dimiliki oleh warga yang benar-benar berdomisili di wilayah tersebut.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020,2024, dan 2025

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (Persen)		
		2010-2020	2020-2024	2020-2025
	1	5	6	7
1.	Kepulauan Seribu	2,69	1,00	1,00
2.	Jakarta Selatan	0,75	0,05	-0,07
3.	Jakarta Timur	1,17	0,43	0,33
4.	Jakarta Pusat	1,53	-0,32	-0,37
5.	Jakarta Barat	0,63	0,49	0,45
6.	Jakarta Utara	0,76	0,54	0,47
TOTAL		0,92	0,31	0,23

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2025)

Tabel 2.2 memperlihatkan kecepatan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengalami penurunan setiap periode tahunnya. Kepulauan Seribu masih menduduki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sejumlah 2,69% pada periode 2010-2020 dan mengalami kestabilan angka sebesar 1,00% untuk dua periode berturut-turut. Sementara itu, terdapat wilayah yang mengalami pertumbuhan negatif di periode 2020-2024 dan 2020-2025, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dari data Badan Pusat Statistik,

tercatat bahwa Jakarta Selatan mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,07% (2020-2025). Sedangkan, Jakarta Pusat mengalami pertumbuhan negatif secara dua periode berturut-turut sebesar minus 0,32 (2020-2024) dan minus 0,37 (2020-2025).

2.1.3 Kondisi Transportasi di Provinsi DKI Jakarta

Beragam transportasi yang dimiliki yang tersedia di DKI Jakarta, seperti sepeda motor, mobil, bus dan lainnya. Pada tahun 2024, jumlah yang memiliki sepeda motor lebih tinggi dari pada kendaraan lain sekitar 76,033%, di susul oleh mobil penumpang sekitar 19,352%. Selanjutnya, terdapat bus yang memiliki jumlah terendah sekitar 0,302% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025). Walaupun, kebanyakan masyarakat DKI Jakarta memiliki kendaraan pribadi, pemerintah tetap mengadakan transportasi umum sebagai bentuk peningkatan infrastruktur dan memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, sebagai upaya untuk mengurangi volume kendaraan agar dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Sampai saat ini, transportasi umum di DKI Jakarta masih terus beroperasi dan meningkatkan pelayanan agar memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi masyarakat DKI Jakarta.

Tabel 2.3 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022–2024

Kabupaten/Kota	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
Kepulauan Seribu	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
Jakarta Selatan	2022	-	1.999,82	-	1.999,82
	2023	-	1.999,82	-	1.999,82
	2024	-	2.006,02	-	2.006,02
Jakarta Timur	2022	-	1.517,83	-	1.517,83
	2023	-	1.517,83	-	1.517,83
	2024	-	1.520,66	-	1.520,66
Jakarta Pusat	2022	-	692,16	-	692,16
	2023	-	692,16	-	692,16
	2024	-	693,38	-	693,38
Jakarta Barat	2022	-	1.181,95	-	1.181,95
	2023	-	1.181,95	-	1.181,95
	2024	-	1.184,95	-	1.184,95
Jakarta Utara	2022	-	1.100,58	-	1.100,58
	2023	-	1.100,58	-	1.100,58
	2024	-	1.102,70	-	1.102,70
DKI Jakarta	2022	-	6.492,34	-	6.492,34
	2023	-	6.492,34	-	6.492,34
	2024	-	6.504,71	-	6.504,71

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2025)

Panjang jalan adalah sebuah faktor transportasi yang semestinya diperhatikan dalam mewujudkan transportasi lebih baik di DKI Jakarta. Merujuk pada data BPS Provinsi DKI Jakarta pada tabel 2.3, terlihat adanya peningkatan panjang jalan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota pada tahun 2022-2024. Dari data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2022-2023 total panjang jalan di wilayah DKI Jakarta sebesar 6.492,34 km, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan panjang jalan sepanjang 12,37 km. Secara wilayah

administratif, wilayah dengan panjang jalan terluas adalah Jakarta Selatan yang mencapai 2.006,02 km pada tahun 2023, diikuti oleh Jakarta Timur dengan 1.517,83 km, sedangkan wilayah dengan panjang jalan terpendek adalah Jakarta Pusat yaitu sekitar 692,16 km. serta Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang masing-masing memiliki panjang jalan sekitar 1.181,95 km dan 1.100,58 km.

Adapun Kabupaten Kepulauan Seribu tidak tercantum dalam data panjang jalan, yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi geografis wilayah tersebut yang didominasi oleh perairan, sehingga infrastruktur jalan darat tidak menjadi prasarana utama mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan panjang jalan di DKI Jakarta pada periode 2022–2024 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas dan memperbaiki jaringan transportasi darat guna mendukung mobilitas penduduk dan distribusi ekonomi.

2.2 Gambaran Umum PT Transjakarta

2.2.1 Sejarah Transjakarta

Transjakarta merupakan transportasi umum yang berbasis sistem transportasi BRT. Tahun 2004, Transjakarta mulai diberlakukan dan tercatat mempunyai jalur lintasan terpanjang di dunia. Cakupan operasional Transjakarta tidak hanya beroperasi di wilayah DKI Jakarta, melainkan juga melayani rute perjalanan ke wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Sebelum Transjakarta resmi beroperasi, Transjakarta sudah mencetak rekor sebagai BRT pertama di Asia Tenggara. Transjakarta berbentuk Badan

Pengelola yang berdasarkan Keputusan Gubernur No. 110/2003. Namun, di tahun 2006, Transjakarta berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Unit Pelaksana Teknis yang dipegang oleh Dishub Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI No. 48 Tahun 2006.

Koridor 1 Transjakarta beroperasi pada 15 Januari 2004, dengan tarif yang telah disubsidi oleh pemerintah daerah. Awal beroperasi tarif yang diberikan gratis untuk menggunakan layanan Transjakarta selama dua minggu, setelah itu tarif mulai diberlakukan sebesar Rp. 2.000. Lalu, terdapat keputusan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa tarif Transjakarta mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 3.500 di tahun 2012. Transjakarta juga mengeluarkan bus yang dikhususkan untuk Perempuan berwarna *pink* pada 21 April 2016 sebagai bentuk peringatan Hari Kartini. Bus pink ini beroperasi di koridor 1 (Blok M – Kota). Di tahun yang sama, Transjakarta juga menambahkan 116 bus baru untuk membantu pengoperasian dan terdapat 1.347 unit bus yang siap beroperasi.

Transjakarta juga memiliki bus *low entry* yang dibeli sebanyak 300 unit di tahun 2017, yang bertujuan untuk memiliki lantai yang rendah dan dapat memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas dalam menaiki bus. Selain itu, Transjakarta juga meluncurkan 116 bus yang bernama *Transjakarta Cares*, yang resmi beroperasi pada 20 September 2016. Layanan ini diberikan secara gratis untuk para penyandang disabilitas. Setelah keberhasilan Transjakarta dalam pengoperasian di koridor 1, pihak Transjakarta melakukan pembangunan koridor-koridor untuk

menambahkan pengoperasian bus di wilayah lain. Transjakarta sekarang merupakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang akan selalu berkembang dan menambahkan jumlah armada untuk memberikan fasilitas transportasi yang terpadu kepada masyarakat sebagai kebutuhan publik.

2.2.2 Visi dan Misi PT Transjakarta

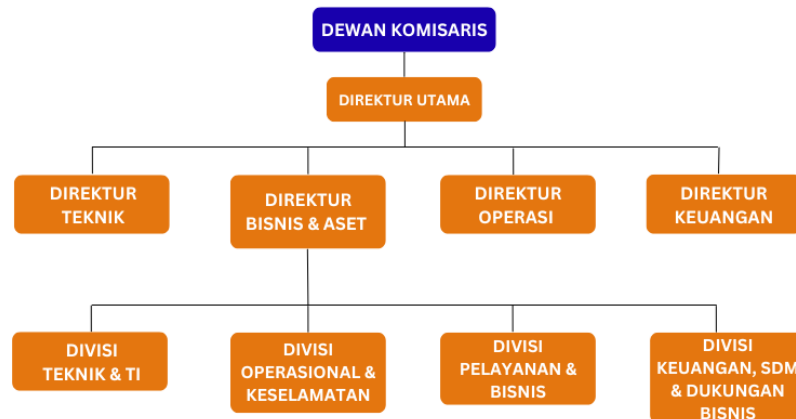
PT Transjakarta merupakan bidang transportasi yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejak tahun 2004, Transjakarta bergerak dalam bidang transportasi BRT. Selain itu, layanan yang diberikan selain BRT terdapat Minitrans, Metrotrans dan juga Mikrotrans. Terdapat visi dan misi yang digunakan Transjakarta dalam menjalankan bisnisnya, sebagai berikut:

1. Visi : Menghubungkan Kehidupan Jakarta.
2. Misi : Bersama-sama menyediakan layanan transportasi terintegrasi yang memudahkan dan membahagiakan kehidupan Jakarta.

2.2.3 Struktur Organisasi

PT Transjakarta adalah BUMD Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sebagai penyelenggara Sistem *Bus Rapid Transit* (BRT). Hal ini diwujudkan dalam misi perusahaan untuk menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan melalui kehadiran struktur organisasi yang baik. PT Transjakarta memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang dipaparkan melalui gambar berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Transjakarta



Sumber: Transjakarta.co.id

2.3 Area Layanan Koridor 10 Transjakarta

Koridor 10 TransJakarta adalah salah satu koridor utama yang melayani rute perjalanan dari Halte Tanjung Priok hingga PGC (Pusat Grosir Cililitan). Koridor 10 resmi dibuka dan mulai beroperasi sejak tahun 2010 yang bersamaan dengan diremiskannya koridor 9. Koridor 10 berperan sebagai salah satu jalur yang menghubungkan dari kawasan pelabuhan dengan pusat perdagangan ibu kota untuk mendukung mobilitas warga.

Koridor 10 merupakan jalur dengan tingkat mobilitas tersibuk yang melintasi pusat bisnis, kawasan padat penduduk serta area perkantoran. Sehingga, banyak pekerja kantoran yang menggunakan rute tersebut sebagai tempat perjalanan menuju ke kantor. Koridor 10 menjadi salah satu koridor yang terintegrasi dengan transportasi umum lainnya, seperti KRL, Mikrotrans, dan koridor Transjakarta lainnya. Sehingga, menjadi salah satu koridor dengan jalur strategis dalam memudahkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum sebagai perjalanan harian.

Gambar 2.3 Rute Koridor 10 Transjakarta



Sumber: Transjakarta.co.id

Berdasarkan gambar 2.3 di atas jalur Koridor 10 menghubungkan dua halte yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, yaitu Halte Tanjung Priok hingga PGC. Koridor 10 ini menjadi salah satu jalur yang cukup sibuk, karena terletak di kawasan perkantoran dan kawasan penduduk. Beberapa halte di Koridor 10 yang berada di daerah Jakarta Utara ini juga berdekatan dengan area pelabuhan yang selalu keluar secara bersamaan melewati jalan-jalan protokol dengan kendaraan-kendaraan besar yang keluar masuk dari area pelabuhan, yang mengakibatkan jalur ini menjadi salah satu jalur dengan aktivitas yang cukup padat.

Secara keseluruhan, jalur koridor 10 melewati tiga daerah administratif yang ada di Jakarta, seperti Jakarta Utara (Halte Tanjung Priok sebagai halte

awal), Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur (Halte PGC sebagai halte akhir). Jalur koridor 10 yang dikenal sebagai jalur integrasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat umum sebagai penumpang Transjakarta Koridor 10 untuk melakukan perjalanan harian. Keberadaan jalur ini membantu penumpang untuk melakukan perpindahan dari kawasan pelabuhan, area perkantoran, hingga pusat grosir dengan hanya menggunakan satu moda transportasi dan kendaraan lainnya sebagai moda transportasi pilihan.

